

IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BIDANG PENDIDIKAN PT. FREEPORT INDONESIA DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

Petrus Almendo Christian Sanadi
NPP. 30.1498

Asdaf Kabupaten Mimika Provinsi Papua
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: petrussanadi4@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Pratiwi Nurhascaryani, M.Si

ABSTRACT (In English)

Problem Statement/ Background (GAP): This research examines the implementation of corporate social responsibility (CSR) programs in the education sector in Mimika Regency, Papua Province, against a background of poor-quality education and reviews the sustainability of programs that are the responsibility of the government. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Programs in the education sector in Mimika Regency is seen from the supporting and inhibiting factors in overcoming implementation obstacles. **Method:** The research method used is descriptive qualitative. The data collection techniques used by the authors are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The focus in this study uses Edward III's theory and its dimensions namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Referring to the parties involved in implementing the implementation of the program (CSR) in the education sector in Mimika Regency, Papua Province, namely the Education Office and the Amungme and Kamoro Community Empowerment Foundation (YPMK). **Results:** The results of this study the authors found that program implementation (CSR) in the education sector in Mimika Regency was still not optimal due to several obstacles. The dimensions of Communication and Resources, Disposition and Bureaucratic Structure have been running efficiently but from the indicators of clarity, incentives, and facilities due to the attitude of implementers in making decisions and access to accommodation and operational costs which are lacking and not quite different from when in the field. However, the implementing party has made a major contribution to the implementation of education in Mimika Regency. Several stages may have been carried out in accordance with Edward III Theory in which there are Communication, Resources, Dispositions and Bureaucratic Structures. **Conclusion:** The author's suggestion is First, the Mimika and Ypmak Regency governments should pay more attention specifically to the level of education in Mimika because this can support human resources. Second, related to communication, it is expected that coordination between implementers can run according to the existing hierarchical levels, and third, namely

that the budgeting by the Education Office and Ypmak must cooperate more in solving existing problems so that existing problems can be resolved properly.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, YPMAK*

ABSTRAK (in Bahasa)

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi program *corporate social responsibility* (CSR) bidang Pendidikan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, dengan latar belakang kualitas pendidikan yang kurang serta meninjau keberlangsungan program yang menjadi tanggung jawab pemerintah. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bidang pendidikan di Kabupaten Mimika serta dilihat dari faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi hambatan implementasi. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Adapun teknik mengumpulkan data yang digunakan oleh penulis yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus dalam penelitian menggunakan teori Edward III beserta dimensi yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Mengacu pada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelaksanaan program (CSR) bidang Pendidikan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua yakni Dinas Pendidikan dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK). **Hasil:** Hasil Penelitian ini penulis menemukan bahwa implementasi program (CSR) pada bidang pendidikan di Kabupaten Mimika masih belum secara maksimal dikarenakan beberapa hambatan. Dimensi Komunikasi dan Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi telah berjalan efisien namun dari indikator kejelasan, Insentif serta Fasilitas karena sikap pelaksana yang dalam mengambil keputusan dan akses akomodasi serta biaya operasional yang kurang dan belum cukup berbeda saat di lapangan. Akan tetapi, pihak pelaksana telah melakukan kontribusi yang besar terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Mimika. Beberapa tahapan mungkin telah dilaksanakan sesuai dengan Teori Edward III yang mana di dalamnya terdapat Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. **Kesimpulan:** Saran penulis adalah Pertama, pemerintah Kabupaten Mimika dan Ypmak harus lebih memperhatikan secara khusus tingkat pendidikan di Mimika dikarenakan hal tersebut yang dapat menunjang SDM. Kedua, terkait dengan Komunikasi diharapkan koordinasi antara pelaksana dapat berjalan sesuai dengan tingkatan hierarki yang ada, dan yang Ketiga yakni penganggaran oleh Dinas Pendidikan dan Ypmak harus lebih bekerjasama dalam menuntaskan masalah yang ada sehingga permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan semestinya.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility, YPMAK*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sebagai salah satu dari bunyi dari Alinea ke-4 merupakan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki pengertian yaitu pendidikan menjadikan manusia sebagai insan beriman, bertakwa kepada yang kuasa Yang Maha Esa (YME) serta mempunyai segenap pengetahuan, dan kemampuan serta keterampilan untuk memajukan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu

faktor penunjang penting yang menjadi prioritas utama dalam membutuhkan atensi dan prioritas berbagai pihak, pemerintah sebagai organisasi yang mempunyai tanggung jawab dalam memberdayakan serta memanfaatkan sumber daya manusia untuk menghadapi dan menjadi penentu dari kemajuan dan menjadi faktor penentu perkembangan negara berkembang terhadap bangsa ini di masa depan (Salahudin et al., 2018).

Pada sektor pendidikan bentuk dari permasalahan pendidikan di Kabupaten Mimika yakni di kampung-kampung, ada beberapa sekolah yang tidak menggelar proses belajar mengajar secara maksimal karena guru-guru, tidak di dukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga menurunkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mimika. Akibatnya banyak siswa-siswi yang tidak mendapatkan hak dan layanan pendidikan secara maksimal sehingga memicu krisis 3 "M" Membaca, Menulis, dan Menghitung (Antaraneews, 2021). Hal ini sejalan dengan sanggahan dari Tokoh Pemuda Kamoro, Dr Leonardus Tumaka, beliau mendesak pemerintah kabupaten Mimika agar lebih peka dan peduli terhadap masalah pendidikan terkhusus wilayah Pesisir Kabupaten Mimika.

Sejak tahun 1996, Pt. Freeport Indonesia (PTFI) telah berkomitmen dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang mencakup berbagai bidang fasilitas umum, perumahan warga serta Kesehatan, terkhusus pada bidang Pendidikan. Segala bentuk komitmen perusahaan terhadap perkembangan tersalurkan melalui dan kemitraan PTFI yang bertujuan sebagai bentuk *support* pengembangan masyarakat (Ptfi, n.d.). Peran kemitraan dalam era globalisasi dengan perkembangan teknologi, dimana kini semakin pesat. Dengan bentuk kerja sama antara pemerintah dengan pihak lainnya, sehingga menjadikan peran terhadap suatu interaksi kerjasama sebagai hal penting dalam bentuk yang saling menguntungkan satu sama lain. Paradigma dalam pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif ini maka perusahaan, melihat dan menjadi ini sebagai giat usaha dalam pembangunan berkelanjutan dengan konsep dasar kemitraan dari masing-masing pemegang *stakeholder* ke dalam 5 konsep; Ketersediaan, Misi lingkungan, Tanggung Jawab Sosial, Implementasi dalam kebijakan, serta Nilai Keuntungan (Kevin, 2019).

Kebijakan PT. Freeport Indonesia dalam menyediakan program beasiswa yang di Kelola oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat asli setempat di Kabupaten Mimika. Diharapkan dengan adanya program beasiswa dari perusahaan, mutu kualitas pendidikan di papua khususnya Kabupaten Mimika diharapkan dapat diperkecil melalui program yang langsung dikelola oleh YPMAK kepada masyarakat asli.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan mengenai siswa yang kesulitan belajar dialami selama ini menyebabkan siswa yang kurang memahami dan menguasai materi pembelajaran yang di sampaikan. Kesulitan untuk belajar secara mandiri. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, tingkat pendidikan di Papua apabila di tinjau melalui tipe daerah terdapat perbedaan pola pendidikan tertinggi yang ditamatkan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Di daerah perkotaan, penduduk usia 15 tahun ke atas didominasi oleh tamatan SM/ sederajat (40,27 persen). Sedangkan, penduduk di perdesaan didominasi mereka yang tidak mempunyai ijazah (47,28 persen);

Tabel 1.1**Angka Jenjang Pendidikan Provinsi Papua, 2021**

Jenjang Pendidikan					
Karakteristik	Tidak Punya/ Ijazah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	33,58	19,28	17,		
Jenis Kelamin					
Laki-laki	29,3	18,66	18,4	24,36	9,28
Perempuan	38,58	19,98	16,46	17,49	7,7
Tipe Daerah					
Perkotaan	8,48	13,4	19,71	38,6	19,8
Pedesaan	44,21	21,77	16,54	13,71	3,77
Status Ekonomi Rumah Tangga					
Kuantil 1	43,93	23,23	17,33	13,08	2,43
Kuantil 2	40,77	20,95	17,59	15,87	4,82
Kuantil 3	31,03	20,54	18,48	22,64	7,31
Kuantil 4	26,79	16,91	17,79	27,72	10,79
Kuantil 5	27,92	15,82	16,34	24,4	15,52

sumber: (Susenas, 2021)

Selanjutnya apabila di telaah lebih lanjut mengenai jenjang pendidikan tingkat daerah kabupaten Mimika maka partisipasi terhadap prasekolah dengan perbandingan menggunakan wilayah perkotaan dan pedesaan serta memilah secara umur maka semakin tinggi usia maka semakin rendah pula tingkat partisipasinya, rendahnya tingkat partisipasi inilah yang mendorong pemerintah daerah untuk menjawab tantangan permasalahan dengan melakukan bentuk kerja sama bersama dengan perusahaan-perusahaan di daerah mimika. berikut dilampirkan angka persentase partisipasi jenjang pendidikan:

Tabel 1.2**Angka Jenjang Pendidikan Kabupaten Mimika, 2021**

Partisipasi Prasekolah					
Karakteristik	7-12	13-15	16-18	19-24	19-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	83.43	80.02	63.98	22.90	25.26
Jenis Kelamin					
Laki-laki	82.27	80.74	64.08	24.92	22.81
Perempuan	84.71	79.27	64.88	25.66	23.01
Tipe Daerah					
Perkotaan	95.42	96.65	91.31	38.50	42.19
Pedesaan	79.45	74.69	53,13	16.33	18.05

sumber: (Susenas, 2021)

Terlepas dari permasalahan tersebut, di Kabupaten Mimika, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mimika dalam menjawab tantang perkembangan berkelanjutan yang tengah terjadi, seperti halnya sebagaimana yang di lakukan oleh Bank BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Irian Sentosa dan Pt. MWT (Mada Wakri Tunggal) melakukan program CSR (*Corporate Social Program*) untuk meningkatkan kapasitas kesehatan ibu dan anak, memberikan penyuluhan mengenai kesehatan terhadap ibu dan anak yang dilakukan di puskesmas kwamki, sehingga di hal ini di harapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan posyandu kepada masyarakat (Bpririansentosa, n.d.).

Tak hanya itu Bank Papua turut serta dalam membangun kerjasamanya melalui Program CSR dengan memberikan bantuan berupa peralatan, pelatihan dan pendampingan bagi usaha mikro, kecil dan menengah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bankpapua, n.d.).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu. Penelitian dari Benedict M.SM. Renyaam, dkk Universitas Samratulangi (2014) yang berjudul “Efektivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pt. Freeport Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua” (Renyaam et al., 2019) merupakan penelitian yang di lakukan mengenai CSR PTFI dibidang lingkungan dengan melihat seberapa besar dampak dan program apa yang dijalankan oleh PTFI dalam mengurangi distorsi lingkungan.

Penelitian dari Sindi Paramitha Universitas Pasundan (2018) yang berjudul “Kontribusi Csr (*Corporate Social Responsibility*) Pt Freeport McMorran Dalam Pembangunan Di Timika Papua” (Paramitha, 2018). Penelitian yang di lakukan atas Pembangunan di Kota Mimika dengan melihat program CSR pembangunan yang dilaksanakan oleh PTFI melalui LPMK dengan Bantuan Pemda Mimika.

Penelitian dari Mathilda Dwi Lestari Universitas Katolik Parahyangan (2018) yang berjudul “*Corporate Social Responsibility* PT. Freeport Indonesia dalam Pemberdayaan Perempuan di Tembagapura” (Dwi Lestari, 2018). Penelitian ini membahas tentang permasalahan terhadap perempuan di Kota Mimika dengan budaya adat-istiadat yang berlaku di Kota Mimika.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari sebelumnya dan belum di lakukan oleh peneliti terdahulu. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Benedict M.SM. Renyaam, dkk Universitas Samratulangi (2014) yang berjudul “Efektivitas *Corporate Social Responsibility* (Csr) Pt. Freeport Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua” menggunakan teori Efektifitas (Etzion, (Hari, 2007: 42-44)) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sindi Paramitha Universitas Pasundan (2018) yang berjudul “Kontribusi Csr (*Corporate Social Responsibility*) Pt Freeport McMorran Dalam Pembangunan Di Timika Papua”. Menggunakan Teori Pemukiman menurut Hadi Sabari Yunus (1987) dalam Wesnawa dengan metode penelitian menggunakan deskriptif analitis, dengan cara mengumpulkan, melihat, menyusun data untuk di jadikan analisa fenomena.

Penelitian yang dilakukan oleh Mathilda Dwi Lestari Universitas Katolik Parahyangan (2018) yang berjudul “*Corporate Social Responsibility* PT. Freeport Indonesia dalam Pemberdayaan Perempuan di Tembagapura” Menggunakan Teori

Pluralism menurut Viotti, Paul R and Mark V. Kauppi (dalam *Grand Theory*, 1999) dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif dengan melakukan pengumpulan data dan fakta melalui studi literatur, laporan tahunan perusahaan terkait dan berbagai media sumber publikasi.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bidang pendidikan di Kabupaten Mimika serta dilihat dari faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi hambatan implementasi.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara pendekatan kualitatif, dengan ini data yang nanti dikumpulkan berupa naskah hasil dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan catatan lapangan lainnya. Penelitian ini menggunakan 5 orang informan dalam menunjang penelitian untuk mendapatkan informasi. Dalam suatu penelitian informan secara sengaja ditemukan oleh penulis sesuai dengan pertimbangan tertentu terlebih dikarenakan para informan merupakan orang yang paham dalam masalah Pendidikan di Kabupaten Mimika.

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi instrumen penelitiannya yaitu peneliti itu sendiri karena peneliti merupakan instrumen kunci yang menetapkan fokus penelitian, menetapkan informan sebagai sumber data, melakukan analisis data, reduksi data, menilai kualitas data serta mengumpulkan data dan membuat penarikan kesimpulan yang peneliti temukan di lapangan. Untuk mencari data dan informasi dari informan maka menggunakan pedoman observasi, dokumentasi dan wawancara sebagai instrumen pendukung penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur karena digunakan pedoman untuk menggali informasi sedalam-dalamnya sesuai kenyataan yang ada di lapangan, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini sangat berperan penting karena peneliti harus datang secara langsung dan melihat bagaimana kondisi yang ada di lapangan tempat penelitian.

Pada Penelitian ini dalam menetapkan informan digunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *Purposive Sampling* merupakan teknik pengumpulan sampel dari sumber data dengan menjangkau aspek khusus orang yang paling mengetahui mengenai topik terkait.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Freeport Indonesia bidang Pendidikan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Implementasi kebijakan berdasarkan dimensi yang mengacu pada teori Edward III ada faktor yang perlu di perhatikan untuk bekerja secara stimulan dan berinteraksi satu sama lain yakni terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Keempat faktor tersebut selama penelitian penulis menemukan beberapa informasi saat berada di lapangan saat melaksanakan penelitian, faktor-faktor dalam pengimplementasian tersebut di jabarkan sebagai berikut;

A. Komunikasi

Seseorang yang ingin menyampaikan suatu informasi kepada suatu dengan yang lain-nya harus mampu untuk disampaikan secara baik dan jelas sehingga

yang menerima informasi dapat memahaminya, Informasi yang di berikan dapat berupa suatu keterangan mengenai, mempunyai makna tertentu. Bahkan informasi ini yang merupakan suatu bentuk bukti verbal, maupun nonverbal yang dapat berupa suatu petunjuk terhadap sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Bapak Williem Naa menjelaskan bahwa:

Terkait dengan Program CSR dengan lembaga YPMAK sampai saat ini masih menjalin kerja sama, adapun kami mencoba mendatangkan anak-anak dari suku amungme dan kamoro untuk bersekolah di kota sehingga diharapkan ke depan-nya masyarakat asli dapat berkontribusi untuk Kabupaten Mimika, namun ada kendala dalam menampung mereka di asrama Amungme dan Kamoro, sehingga dengan bantuan YPMAK beberapa kendala tersebut dapat ditangani dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, penyampaian yang sama juga di berikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Fransiskus Bokeyau pada hari yang sama:

YPMAK bermitra dengan pemerintah daerah, berkontribusi untuk memberikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkhususnya di Kabapupaten Mimika dengan Sekolah- Sekolah Swasta yang di dalamnya terdapat penduduk asli masyarakat Kabupaten Mimika, dalam hal ini, sekolah berpola asrama yang berada langsung di bawah Dinas Pendidikan yaitu Sentra Pendidikan dan Swasta Sekolah Taruna Papua khusus untuk masyarakat Amungme Dan Kamoro

Selanjutnya dari hasil observasi dilapangan dalam menjalankan program serta membangun pengembangan masyarakat di Kabupaten Mimika, baik di wilayah pegunungan dan pesisir, kemudian sesuai dengan tujuan Ypmak maka dalam konsistensi terhadap pencapaian program dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Dukungan Operasional Lembaga Adat dan Gerej dan Dukungan operasional Yayasan yang ada di Mimika
2. Bantuan terhadap insidental keagamaan, seni budaya dan olahraga (renovasi gereja dan alat-alat musik dan olahraga
3. Dukungan Proyek Non Eksekutif Ptfi (Beberapa giat di antaranya administrasi konsultan peraturan, Rapat dengan narasumber dari *NGO forum on Indonesian Development* dan *United Status Agency for International Development (USAID)*).

B. Sumber Daya

Implementasi tidak akan tepat apabila tidak ditangani oleh tenaga ahli, maupun infrastruktur yang memadai sehingga, pentingnya suatu sumber daya implementasi berupa staf, informasi serta tanggung jawab dan fasilitas. Sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Divisi Humas YPMAK bahwa:

Sumber daya yang ada sekarang cukup memadai, tenaga kerja yang di kirim serta fasilitas yang kami bangun cukup untuk menunjang keberlangsungan program selama dana yang di berikan Pt. Freeport terus berjalan dan tidak di setop. Kami juga langsung turun kelapangan untuk melakukan survei dan melihat kondisi pada lapangan tempat kebijakan berlangsung.

YPMK dengan skala kegiatan yang besar yang mencakup wilayah Kabupaten Mimika, Ypmak bersinergi dengan pihak yang sebagai penyedia barang dan jasa untuk proses operasional, misalnya Diana Supermarket, Grosir Ypmak dan Toko Surya Kencana sebagai penyedia barang ATK, Sembako dan Penyedia Kedukaan dan selanjutnya YPMK juga bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai penyedia kebutuhan jasa untuk mendukung operasional yayasan. Misalnya, Cv. Blessing, Toba Catering, Kuala Oriental Resto, Dan Pt. Trakindo Utama sebagai penyedia barang jasa layanan operasional.

C. Disposisi

Sikap dari seorang pelaksana merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi jalan suatu proses kebijakan, oleh karena itu, sikap mempunyai konsekuensi tersendiri sehingga implementasi menjadi efektif atau tidak. Jika seorang pelaksana ingin efektif dalam menjalankan kebijakan maka para pelaksana harus mampu untuk mengetahui apa yang akan dilakukan serta juga memiliki ketrampilan untuk melaksanakan program. Sehingga dalam praktiknya, pengaruh yang dapat diberikan oleh pelaksana dapat berdampak positif. Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa:

Dalam pengangkatan untuk mampu menangani, menjawab serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan, beberapa individu telah mempunyai kualitas yang baik untuk menjalankan segala urusan yang berkaitan dengan program-program yang diberikan, secara keseluruhan hasil yang di berikan oleh mereka adalah baik.

Selanjutnya, Diketahui bapak Direktur, Vebian Magal dibantu oleh tiga wakil direktur dan bendahara, yaitu: Wakil Direktur Perencana Program, Nur Ihfa Karupukaro, Wakil Direktur Monitoring dan Evaluasi, Yohan Oliver Wambarau, dan Wakil Direktur Pendukung/ Sekretaris Yayasan, Johana Saidui dan Bendahara Ramlon Rambun. Dengan fungsi sebagai pembina yang melaksanakan standar-standar dan kode etik yang sesuai dengan etika umum pada karyawan. Selanjutnya, Divisi Humas Yayasan Pemberdayaan mengatakan bahwa:

Selaku pelaksana dalam kegiatan program yang ada, motivasi tambahan seperti bentuk makanan, minuman atau bahkan acara kecil-kecilan membuat motivasi para pegawai menjadi termotivasi untuk terus bekerja dan tetap loyal.

Sedangkan tambahan dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan;

Memberikan suatu motivasi dalam pekerjaan kepada pegawai pelaksana untuk bekerja terus lebih giat dan mencapai target merupakan suatu tanggung jawab tidak tertulis agar pegawai semangat dalam bekerja.

Dari analisa penulis, bentuk support yang di berikan oleh para pimpinan kepada bawahan memang bermacam-macam namun para pelaksana selalu menghargai apa yang sudah didapatkan dan mengamati bahwa intensif berupa makanan sampai memberi motivasi adalah tindakan yang cukup nyata bagi seorang pemimpin dalam memimpin jalannya program.

D. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi berkenaan dengan letak tata laksana organisasi yang menjadi penyelenggaraan implementasi kebijakan publik, struktur birokrasi

merupakan hal yang terpenting dalam alur birokrat untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai organisasi pembantu pemerintahan daerah. Berorientasi pada Program Kerja, masing-masing divisi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

Program Pendidikan:

1. Fokus Anak dan Pemuda.
2. Fokus Tenaga Pendidikan dan Kependidikan.
3. Fokus Pendukung (Pelatihan bagi Guru-Guru).

Program Kesehatan:

1. Kesehatan Masyarakat.
2. Pelayanan Medis.

Program Pengembangan Ekonomi:

1. Pendanaan Ekonomi Produktif.
2. Pengembangan Ekonomi Kampung (Pekam).
3. Agrisbisnis.

Kemitraan (Kerjasama dengan Yayasan serta Pemerintah Daerah)

Program Lain:

1. Bantuan Dana Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK).
2. Dukungan Dana Pengembangan Kampung Ugimba.
3. Bantuan Bencana Alam dan NonAlam.
4. Sponsor Promosi Seni Budaya dan Kearifan Lokal.

Sesuai dengan VISI dan MISI, Menjadi lembaga independent, Professional dan Mandiri, serta dalam bermitra, mengelola, menyelenggarakan dan memberdayakan masyarakat Mimika. Dalam wawancara tersebut penulis menganalisa bahwa tugas yang diberikan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugas sudah baik sehingga kegiatan program dalam terkendali. SOP dalam pelayanan publik sudah merupakan hal yang tercantum dalam suatu kebijakan, karena dengan standar kita mampu untuk mengetahui seberapa besar perkembangan dalam kebijakan yang telah di jalankan.

3.2 Faktor Pendukung dalam Implementasi Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Freeport Indonesia bidang pendidikan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Dinas Pendidikan selalu memberikan yang terbaik terhadap layanan pendidikan dan turut dalam berkoordinasi dengan OPD terkait, hal ini bertujuan agar seluruh program yang diselenggarakan dapat di laksanakan dengan baik dan dapat di dukung oleh organisasi lainnya, serta turut untuk ikut aktif dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, serta inovatif agar mencapai sasaran pencapaian program. Sikap keterbukaan dan koordinasi dengan OPD maupun bentuk kerjasama yang dilakukan dengan Lembaga Non-Pemerintah dilakukan demi mencapai pelayanan publik dan mencapai kesejahteraan daerah sehingga masyarakat selalu bisa mengandalkan pemerintah maupun organisasi terkait.

Program yang berkaitan dengan CSR yakni;

- a. Sekolah sentra Pendidikan yang menampung masyarakat dari Pesisir dan Pegunungan Kabupaten Mimika.
- b. Fasilitas: Kantor dan Gedung Asrama yang di gunakan oleh sekolah Asrama.

Selanjutnya, Program *corporate social responsibility* dengan pemerintah merupakan langkah nyata lembaga non-pemerintah untuk menyatakan kesediaan dan kesanggupan dalam membangun Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika, beberapa program yang telah di laksanakan yakni;

a) Program Kesehatan:

Dalam hal ini Program kesehatan Masyarakat dengan cakupan sebanyak 8.234 jiwa atau 1.686 keluarga termasuk 1.327 balita dan 1.408 anak usia sekolah dan Program Kampung Sehat dan Klinik Bergerak dengan cakupan wilayah Program 16 Kampung di lima distrik (Distrik Agimuga, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Amar dan Tembagapura).

b) Program Pendidikan:

Dalam hal ini mengenai Fokus Anak dan Pemuda diantaranya adalah 5 peseta beasiswa penerbangan di API Banyuwangi, 1 lulus sekolah penerbangan dan lanjut fase selanjutnya, 10 program beasiswa s2 dan s3 serta 2 penerima beasiswa di Jerman, 3 di Filipina dan 1 Orang di China, serta selanjutnya Fokus pada sekolah Asrama Taruna Papua dengan 4 sekolah lainnya yang turut bekerja sama dengan YPMAK.

c) Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi

- Program Ekonomi Mandiri, dengan memberikan subsidi yang dibutuhkan terhadap usaha menengah kecil masyarakat miskin
- Program Agribisnis: bantuan berupa Alat penangkapan ikan kepada 15 kelompok dan 150 nelayan tradisional yang tersebar di kampung-kampung pesisir dan pegunungan.
- Pengembangan Ternak Babi; Pemberian Pangan Babi serta membina masyarakat dengan membangun kandang babi permanen, serta dukungan fasilitas.
- Pengembangan Pertanian; diantaranya adalah 30 petani kopi, jagung dan sayuran Suku Amungme dan 10 petani sagu dari Suku Kamoro
- Pengembangan Ekonomi Kampung di dataran tinggi mendatangkan subsidi Transportasi dan Operasional bagi 11 Koperasi/Kios di Dataran tinggi.

3.3 Faktor Penghambat Pendukung dalam Implementasi Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Freeport Indonesia bidang pendidikan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Dalam Program dibutuhkan penganggaran yang cukup besar, karena pengembangan wujud program yang sangat besar sehingga anggaran yang di tuturkan bukan kecil. Yang menjadi permasalahan menurut penulis yakni tidak semua masyarakat dapat di wadah dengan program yang ada melainkan program di batasi apabila telah memenuhi kuota yang di berikan, Bapak Direktur Vebian Magal mengatakan bahwa

“Sejak tahun 2015 sampai saat ini, kuota yang diberikan oleh YPMAK adalah 800 orang, namun sekarang ini terjadi peningkatan sebanyak 3000 yang tersebar di seluruh kota studi di Indonesia baik di Papua hingga ke luar Papua”.

Adapun menurut hasil wawancara dengan Divisi Human YPMAK mengatakan bahwa,

“Apabila dana kita tidak di setop maka program yang ada mampu untuk terus berjalan, karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dana disetop antara lain para penerima program tidak melaksanakan program dengan baik sehingga dana dari Freeport terpaksa harus di berhentikan.” Sedangkan menurut Bapak Sekretaris Dinas Kabupaten Mimika.”

Terkait dengan Dana yang ada, untuk menjalankan program tentunya tidak sembarang di berikan begitu saja sehingga diperlukan pendataan untuk setiap pengeluaran yang ada. Kesimpulan yang dapat penulis dapatkan adalah Kabupaten Mimika cukup selektif baik dalam pemenuhan kuota serta dalam menggelontorkan dana yang ada sehingga keterhambatan dalam penyelenggaraan pun terjadi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapati bahwa dalam implementasinya program CSR memiliki fasilitas yang telah cukup memadai, seperti telah disebutkan dalam faktor pendukung, akan tetapi dalam wawancara dengan Divisi Humas, mengatakan bahwa;

Walaupun kita sudah membangun fasilitas yang layak untuk masyarakat, masih saja ada oknum yang terus secara berkala merusak fasilitas yang dibangun, serta apabila terjadi keterlambatan dalam bertindak atau mengambil keputusan di lapangan masyarakat cenderung bersikap tidak kooperatif.” Selanjutnya dalam hal memobilisasi akses yang ditempuh para pelaksana, tentunya dalam hal sosialisasi maupun segi keamanan. Kami sendiri susah untuk mendapatkan akses untuk masuk ke kampung dan juga alasan keamanan dan ketertiban kampung.”

Hasil dari wawancara tersebut, penulis mendapati bahwa masyarakat perlu tau bahwa pelayanan publik yang dilakukan merupakan hak mereka dan sudah menjadi tanggung jawab bagi aparatur yang bertugas untuk melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bidang pendidikan di Kabupaten Mimka serta dilihat dari faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi hambatan implementasi, perlu dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang berlaku agar implementasinya bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Penulis menemukan bahwa masyarakat yang masih kurang paham, hal ini disebabkan kurangnya informasi yang diterima serta masyarakat sehingga implementasi program terkendala.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bidang Pendidikan PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bidang Pendidikan PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika Provinsi Papua telah berjalan sesuai kebijakan program namun masih dalam pelaksanaannya perlu agar ditingkatkan. Meninjau dari teori Edward 3 menggunakan dimensi dalam pementaan implementasi suatu kebijakan, maka dalam Komunikasi terkait dengan interaksi sesama pelaksana komunikasi yang terjalin memang telah berjalan baik namun selalu terjadi miskomunikasi dan belum maksimal, selanjutnya sumber daya Fasilitas' Sarana yang telah dibangun untuk menunjang program memang berjalan baik dalam pembangunan-nya namun belum maksimal dalam perawatannya sehingga kekurangan ini dapat membuat kualitas program menurun, dan dalam Disposisi Sikap dari pelaksana berupa kesiapan dalam menjalankan kebijakan yang ada, walaupun terkendala dari segi komunikasi namun para pelaksana menyikapi segala kondisi dengan situasi di lapangan dengan tanggap, efisien dan beradaptasi dengan baik, dan terakhir Struktur Birokrasi Pemetaan struktur kepegawaian menurut penulis telah berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing dalam menjalankan kebijakan yang ada. Hal ini di buktikan dengan adanya pihak pembina, pengawas pengurus yang bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bidang Pendidikan Pt. Freeport Indonesia, sebagai berikut:
 - a) Faktor Pendukung
 - Konsistensi yang dilakukan oleh para pelaksana, kemampuan dan perilaku para pelaksana yang mendukung berjalannya program, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaatnya.
 - Fasilitas yang mendukung, gedung-gedung yang di bangun untuk menunjang proses berjalannya program serta akomodasi yang di berikan oleh kedua pemangku kepentingan untuk saling mencukupi.
 - Komunikasi yang berjalan dinilai oleh penulis berjalan dengan baik, karena di perlakukannya rapat-rapat untuk saling memantau dan me monitoring jalan program, serta evaluasi pada setiap kinerja.
 - b) Faktor Penghambat
 - Komunikasi yang terjalin antara pelaksana internal program perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi miskomunikasi dalam penyampaiannya, misalnya mereka yang di pedalaman maupun di pegunungan
 - Akses yang susah dalam menempuh daerah kebijakan di perlukan akomodasi yang memadai serta keamanan yang dapat menunjang keberlangsungan.
 - Biaya yang di gelontoran atau biaya operasional saat di lapangan agar perlu diperhatikan agar tidak menjadi penghambat ke depannya

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, Penelitian ini juga hanya di laksanakan pada satu lingkup saja sebagai modal dari studi kasus yang dipilih atas dasar pendapat Edward III.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program literasi di Kabupten Mimika untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V. Ucapan Terimakasih

Ucapan Terimakasih penulis tujukan kepada para kepala pemimpin Lembaga/Organisasi yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro beserta jajaran yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. Daftar Pustaka

- Antaraneews. (2021). *intelektual kamoro soroti penurunan kualitas pendidikan di mimika*. <https://doi.org/https://www.antaranews.com/berita/2157250/intelektual-kamoro-soroti-penurunan-kualitas-pendidikan-di-mimika>
- Bankpapua. (n.d.). *Bantuan CSR Peduli Pendidikan*. <https://www.bankpapua.co.id/home/index/detail/informasi-csr-582>
- Bpririansentosa. (n.d.). *BANK BPR IRIAN SENTOSA DAN PT. MWT LAKUKAN PROGAM CSR DI MIMIKA*. <https://bpririan.com/bank-bpr-irian-sentosa-dan-pt-mwt-lakukan-program-csr-di-kabupaten-mimika/>
- Dwi Lestari, M. (2018). Corporate Social Responsibility Pt. Freeport Indonesia dalam Pemberdayaan Perempuan di Tembagapura (2012-2015). *Repository Unpar*, 114.
- Kevin, S. (2019). *Sikap pelajar tujuh suku mengenai CSR beasiswa PT Freeport Indonesia di Timika Papua*. <https://doi.org/http://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/19134/>
- Paramitha, S. (2018). Kontribusi Csr (Corporate Social Responsibility) Pt Freeport McMorran dalam Pembangunan di Timika Papua. *Jurnal Penelitian*.
- Ptffi. (n.d.). *Peningkatan Kapasitas Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Menjaga Kebersamaan*. <https://doi.org/https://ptfi.co.id/id/community-capacity-building>
- Renyaam, B., Mantiri, M., & Kaseda, V. (2019). Efektivitas Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Freeport Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–11. <file:///C:/Users/user/Downloads/28163-57867-1-SM.pdf>
- Salahudin, Akos, M., & Hermawan, A. (2018). Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana di MTsN Banjar Selatan 2 Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 2(1), 1–13. <https://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus/article/download/18/9>
- Susenas, B. P. S. (2021). *Indikator Pendidikan Papua Tahun 2021*. <https://papua.bps.go.id/publication/2022/05/30/ece800d29d2b1a365cac0734/indikator-pendidikan-provinsi-papua-tahun-2021.html>